



IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN MELALUI KARTU INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI KOTA SURABAYA – JAWA TIMUR

Vidya Rachma Pracelia Djoko Widodo, Radjikan

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2024

Revised Juli 2024

Accepted Juli 2024

Available online Juli 2024

Vidyarachma2195@gmail.com,
jokowid@untag-sby.ac.id,
radjikan@untag-sby.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstract

The development of education is a top priority in the national development agenda due to its crucial role in achieving progress in various aspects of life. However, many Indonesian citizens still lack access to education, primarily due to poverty. To address this issue, the government has launched the Smart Indonesia Program (PIP) through the Smart Indonesia Card (KIP) and the Family Hope Program (PKH). PKH provides conditional social assistance to poor and vulnerable families with the aim of improving human resource quality, especially in education and health sectors. Nonetheless, the implementation of these programs still faces various challenges, such as lack of socialization, data inaccuracies, low participation, and potential misuse of assistance. This study aims to examine the implementation of PKH through KIP in Surabaya, East Java, to understand the processes, mechanisms, and factors influencing its implementation, as well as its impact and benefits for beneficiary families and school-aged children. The results of this study are expected to provide recommendations to enhance the effectiveness

and efficiency of the program in efforts to equalize education in Surabaya.

Keywords: family hope program, smart Indonesia card, implementation, education, smart Indonesia program

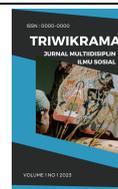
Abstrak

Pendidikan memainkan peran penting dalam kemajuan di berbagai bidang kehidupan, sehingga pembangunan pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Tetapi banyak orang di Indonesia tidak memiliki akses ke pendidikan, terutama karena kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dengan memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan, PKH meningkatkan sumber daya manusia, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian, masih ada banyak masalah yang menghalangi pelaksanaan program-program ini. Ini termasuk kekurangan sosialisasi, kesalahan data, partisipasi yang rendah, dan kemungkinan penyalahgunaan bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses, mekanisme, dan elemen yang mempengaruhi pelaksanaan PKH melalui KIP di Surabaya, Jawa Timur, dan efeknya.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Implementasi, Pendidikan, Program Indonesia Pintar

Pendahuluan

Kemajuan di berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya, bergantung pada pendidikan. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan harus menjadi



prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak setiap penduduknya. Menurut Konstitusi 1945, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan umum. Meskipun hak untuk pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia, beberapa orang masih menghadapi hambatan. Pendidikan wajib belum sepenuhnya diterapkan.

Kesetaraan pendidikan adalah salah satu masalah pendidikan di Indonesia karena hal itu tertuang dalam konstitusi. Hak atas pendidikan ditetapkan pada tahun 1945. Oleh karena itu, pemerintah harus menjalankan pendidikan secara merata. Tidak hanya anggota masyarakat kelas menengah dan atas di Indonesia yang berhak atas pendidikan yang layak, tetapi juga anggota masyarakat miskin. Lihat bagaimana pembangunan pendidikan berjalan di Indonesia. Masyarakat miskin tidak memiliki martabat dan kehormatan yang sama dengan masyarakat kelas menengah atas. Dalam hal ini, ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang proaktif dalam melakukan pemerataan pendidikan.

Di Indonesia, berbagai program kebijakan sosial telah digunakan untuk mengatasi kemiskinan hingga saat ini. Program-program ini termasuk Inpres Desa Tertinggal, jaminan sosial, Kredit Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna untuk mengurangi kemiskinan, pengembangan kecamatan, penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah (PMT-AS), operasi pasar khusus (OPK-Beras), beasiswa, dan dana operasional untuk penduduk miskin. Meskipun demikian, program intervensi ini seringkali tidak berhasil dalam mengatasi kemiskinan. Ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program dan peran yang kurang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, daerah memainkan peran penting sebagai tempat di mana kebijakan bertemu dengan aspirasi masyarakat.

Pada September 2020, tingkat kemiskinan di Jawa Timur adalah 11,46%, dengan jumlah penduduk miskin 4,72 juta orang. Namun, pada Maret 2021, tingkat kemiskinan turun menjadi 10,59%, dengan jumlah penduduk miskin 4,35 juta orang. Penurunan ini menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi dan sosial di Jawa Timur setelah dampak pandemi COVID-19, yang mengakibatkan kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2020. Meskipun kemiskinan telah menurun, Jawa Timur menempati urutan keempat provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, setelah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, menurut data BPS. Jawa Timur juga memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia—sekitar 10% dari total populasi.

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Kota Surabaya cenderung menurun selama periode 2020–2023, baik dalam jumlah maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin mencapai 145,67 ribu pada tahun 2020, tetapi turun menjadi 136,37 ribu pada tahun 2023. Selain itu, persentase penduduk miskin turun dari 5,23% pada tahun 2020 menjadi 4,65% pada tahun 2023.



Gambar 1. 1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kota Surabaya, 2003-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

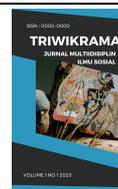
PKH yang merupakan salah satu program yang diawasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan termasuk dalam kategori bantuan dan perlindungan sosial, telah diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Keluarga sangat miskin (KSM) biasanya menerima bantuan tunai dari program ini jika mereka memenuhi persyaratan tertentu.

Penerima dapat mendapatkan uang dari program setelah memenuhi beberapa syarat, seperti memastikan anak-anak mereka pergi ke sekolah. Sebaliknya, KIP adalah program bantuan pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses ke pendidikan yang mereka butuhkan. Dalam RPJMN 2015–2019, program nasional Program Indonesia Pintar (PIP) didirikan. PIP adalah implementasi dari Nawacita ke-5, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. PIP diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak berusia 6 hingga 21 tahun, memungkinkan mereka untuk melanjutkan sekolah menengah, dan mencegah putus sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertanggung jawab atas PIP. Komponennya terdiri dari Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bank Himbara, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, lembaga pendidikan, dan komunitas. Untuk meningkatkan kehidupan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, salah satu program prioritas pemerintah adalah PIP. Program ini diharapkan akan berdampak positif pada perkembangan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif di Indonesia. Diharapkan bahwa PKH melalui KIP akan berdampak positif pada kesejahteraan, pemberdayaan, dan kemandirian keluarga miskin dan rentan di Surabaya untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendidikan. Selain itu, diharapkan bahwa anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin dan rentan akan tetap bersekolah, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar, dan jumlah anak yang putus sekolah akan berkurang..

Namun, dalam pelaksanaannya, PKH melalui KIP masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Beberapa di antaranya adalah: kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait, adanya kesalahan data dan penyaluran bantuan, rendahnya partisipasi dan kepatuhan KPM dalam memenuhi kewajiban-kewajiban PKH, adanya potensi penyalahgunaan dan penyelewengan bantuan, serta kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap dampak program.

Akibatnya, penelitian ini diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKH melalui KIP di Surabaya. Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman kita tentang proses, mekanisme, dan elemen yang mempengaruhi pelaksanaan PKH



melalui KIP di Surabaya. Selain itu, penelitian ini juga meneliti dampak dan manfaat PKH melalui KIP bagi KPM dan anak-anak usia sekolah di Surabaya. Diharapkan penelitian ini akan memberikan saran dan masukan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program PKH melalui KIP dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan di Surabaya.

Landasan Teori

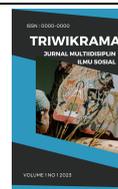
Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu. (dalam Budi Winarno, 2008:146-147). Langkah-langkah ini dilakukan dengan maksud untuk mencapai perubahan besar maupun kecil yang telah dilakukan oleh keputusan kebijakan dan organisasi publik untuk mencapai tujuan tertentu.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) mengatakan implementasi adalah pemahaman tentang apa yang terjadi setelah suatu program atau kebijakan diputuskan berlaku atau dibuat, seperti yang dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65). Keputusan kebijakan menetapkan atau menentukan tujuan dan tujuan kebijakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan tersebut disebut implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan juga merujuk pada peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah pedoman kebijakan negara disahkan.

Seperti yang dinyatakan oleh Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181), beberapa elemen penting termasuk pemberian otoritas dan sumber daya yang diperlukan untuk mengubah rencana dari dokumen tertulis menjadi layanan publik yang efektif, serta pekerja yang kompeten dan memiliki keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka..

Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) menyatakan bahwa dua komponen utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi adalah lingkungan implementasi dan isi kebijakan (atau isi kebijakan). Faktor-faktor ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, bagaimana kelompok sasaran atau target group terlibat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, seberapa besar perubahan yang diharapkan dari kebijakan, apakah lokasi program sesuai atau tidak, kejelasan. Implementasi PKH Melalui KIP dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di Kota Surabaya – Jawa Timur, peneliti menggunakan teori model implementasi Grindle (1980) dengan enam variable yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan program, yang meliputi:

1. Kondisi ekonomi dan social
 - a. Menilai seberapa baik program menganalisis data ekonomi dan social untuk menyesuaikan bantuan, dan Mengukur efektivitas upaya untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
2. Struktur pemerintahan
 - a. Mengukur efektivitas kerjasama dan koordinasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya, dan Menilai sejauh mana program dapat disesuaikan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lokal.
3. Dukungan politik
 - a. Mengukur dukungan dari pejabat pemerintah dan politisi terhadap program, dan Menilai adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi PKH (Program Keluarga Harapan) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar).
4. Kapasitas administratif



- a. Mengukur kompetensi institusi dan aparatur pemerintah dalam mengelola dan melaksanakan program, dan Menilai efektivitas mekanisme pengawasan untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan.
5. Partisipasi public
 - a. Mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pendataan penerima manfaat dan sosialisasi program, dan Menilai efektivitas system untuk menerima dan merespon umpan balik dari Masyarakat penerima manfaat.
6. Kultur dan nilai local
 - a. Menilai tingkat penerimaan masyarakat terhadap program berdasarkan nilai-nilai dan budaya local, dan Mengukur sejauh mana implementasi program disesuaikan untuk menghormati dan sesuai dengan budaya dan nilai-nilai setempat.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan holistik terhadap latar belakang dan individu. Ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang dapat diamati dari subjek. Bogdan dan Taylor (dalam Abdussamad, 2021: 30) menyatakan Subjek penelitian kualitatif ini memiliki ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan yang terkait dengan topik penelitian. Selain menggunakan angka, pendekatan penelitian ini mengumpulkan data melalui berbagai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk memahami dan menggambarkan implementasi program Keluarga Harapan di Kota Surabaya dalam upaya pemerataan pendidikan. Untuk melakukan ini, Kartu Indonesia Pintar digunakan. Observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka adalah beberapa cara peneliti menggunakan informan sebagai sumber informasi. Tahap reduksi data, juga dikenal sebagai triangulasi, digunakan untuk melakukan analisis..

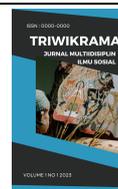
Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian merupakan interpretasi akhir dari pengujian data dengan menggunakan teori dan konsep dari para ahli, yang bertujuan untuk mengembangkan teori baru dan mendeskripsikan data serta fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam kerangka teori implementasi kebijakan model Grindle, penelitian ini akan membahas beberapa indikator, yaitu:

1. Kondisi Ekonomi dan Sosial

Program Keluarga Harapan dan Kartu Indonesia Pintar di Surabaya telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip teori implementasi Marilee S. Grindle dengan baik. Program-program ini tidak hanya memberikan bantuan tunai bersyarat untuk pendidikan dan kesehatan, tetapi juga secara efektif menganalisis data ekonomi dan sosial untuk menyesuaikan bantuan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Hal ini terlihat dari perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi dan sosial keluarga penerima manfaat, yang mengalami pemulihan dan peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan dasar.

Implementasi KIP, misalnya, berhasil mengurangi beban biaya pendidikan sehingga mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain seperti pangan dan kesehatan, sesuai dengan teori Grindle yang menekankan pentingnya adaptasi program terhadap konteks lokal dan analisis yang cermat terhadap kebutuhan masyarakat sasaran. Selain itu, program ini juga meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dan mengurangi risiko putus sekolah, sejalan dengan upaya memastikan bantuan tepat sasaran dan efektif.



Secara sosial, baik PKH maupun KIP membantu mengurangi stigma sosial terhadap penerima manfaat, meningkatkan rasa diterima di sekolah, dan memperkuat interaksi sosial di komunitas. Dengan demikian, implementasi kedua program ini tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial yang penting bagi kesejahteraan keluarga miskin di Surabaya, sesuai dengan pendekatan Grindle yang menekankan pentingnya integrasi antara dimensi teknis dan sosial dalam implementasi kebijakan publik.

2. Struktur pemerintahan

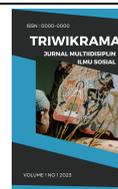
Implementasi PKH dan KIP menunjukkan beberapa pola kerja sama dan koordinasi yang mencerminkan teori implementasi Marilee S. Grindle dalam konteks struktur pemerintahan. Koordinasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya terlihat efektif dalam mendukung tujuan program untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat dan memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga penerima bantuan.

Menurut Grindle, implementasi kebijakan publik melibatkan integrasi yang erat antara berbagai instansi pemerintah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam kasus ini, kerjasama antara Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dalam mendata, memverifikasi, serta memonitor keluarga penerima manfaat menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan proses administratif dan operasional guna memastikan bahwa bantuan disalurkan dengan akurat dan tepat waktu. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, yang kadang-kadang memperlambat proses penyaluran bantuan, kolaborasi antarinstansi ini tetap mampu memenuhi kebutuhan lokal dengan adaptasi yang diperlukan. Pihak-pihak terlibat seperti pendamping PKH dan pihak sekolah juga berperan penting dalam memastikan bahwa persyaratan program dipenuhi dengan baik oleh masyarakat penerima manfaat.

Namun demikian, masih terdapat ruang untuk meningkatkan sosialisasi program kepada masyarakat agar informasi tentang program ini lebih tersebar luas dan aksesnya semakin mudah bagi mereka yang memenuhi syarat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip teori implementasi Grindle yang menekankan pentingnya komunikasi dan transparansi dalam menjalankan kebijakan publik. Secara keseluruhan, struktur pemerintahan terkait dengan implementasi PKH dan KIP telah menunjukkan langkah-langkah yang cukup baik dalam menghadapi tantangan dan menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal. Namun, terus meningkatkan koordinasi antarinstansi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan menjadi kunci untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan program ini di masa depan.

3. Dukungan Politik

Dukungan politik terhadap implementasi Program Keluarga Harapan dan Kartu Indonesia Pintar di tingkat daerah sangat signifikan. Menurut teori implementasi kebijakan dari Grindle, keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan politik dan administrasi di mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Dalam konteks PKH dan KIP, dukungan ini dapat dilihat dari berbagai tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah dan politisi lokal untuk memastikan program ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Dinas Sosial, misalnya, berperan aktif dalam mendukung PKH melalui KIP dengan menyediakan kantor layanan sosial dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara mengikuti program ini. Mereka juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program untuk memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat



dengan baik. Ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, yang merupakan salah satu elemen penting dalam teori Grindle.

Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah tidak hanya sebatas penyediaan fasilitas, tetapi juga mencakup alokasi anggaran untuk operasional program. Dukungan ini termasuk alokasi anggaran untuk operasional program, pengembangan kebijakan lokal yang mendukung, seperti pelatihan keterampilan tambahan, dan koordinasi yang baik dalam mengatasi tantangan di tingkat lokal. Dukungan semacam ini penting untuk memastikan bahwa para pendamping PKH dapat memberikan bantuan yang lebih efektif kepada keluarga penerima manfaat, sesuai dengan pandangan Grindle bahwa dukungan politik yang kuat dapat membantu mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan.

Dukungan politik juga terlihat dalam upaya pemerintah daerah untuk mengurangi biaya sekolah bagi siswa penerima PKH dan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Pemerintah daerah aktif dalam mengadvokasi program ini untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah mereka. Ini sejalan dengan teori Grindle yang menekankan pentingnya lingkungan politik yang mendukung untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Tidak hanya dari sisi pemerintah, masyarakat penerima manfaat juga merasakan adanya dukungan yang memadai. Proses pengajuan KIP relatif mudah dan petugas di kantor pelayanan sosial setempat sangat membantu. Meskipun ada beberapa kendala administratif kecil, secara keseluruhan beliau merasa didukung dan melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyosialisasikan KIP di masyarakat dan memberikan pendampingan kepada penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa program ini mendapat dukungan politik yang memadai untuk berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa dukungan politik terhadap PKH dan KIP di tingkat daerah sangat kuat, yang mencakup berbagai aspek mulai dari penyediaan fasilitas, alokasi anggaran, pengembangan kebijakan lokal, hingga pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat. Dukungan ini sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana dinyatakan oleh Marilee S. Grindle bahwa faktor-faktor lingkungan politik dan administrasi sangat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Dengan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, program PKH dan KIP dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

4. Kapasitas Admiistratif

Dinas Sosial Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas administratif institusi mereka. Hal ini sejalan dengan teori implementasi Marilee S. Grindle yang menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada kompetensi institusi dan aparatur yang mengelolanya. Dinas Sosial Surabaya, melalui pelatihan rutin bagi stafnya, memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan PKH memiliki pemahaman mendalam tentang prosedur administrasi yang diperlukan. Pelatihan ini mencakup penanganan data, pelaporan, dan penerapan prosedur operasional standar, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Pelatihan administratif bagi pendamping PKH juga menjadi fokus penting. Mereka diberikan pengetahuan mendalam tentang kebijakan PKH, prosedur administrasi, dan pengelolaan data. Dengan pelatihan ini, pendamping PKH dapat membuat laporan yang akurat, memverifikasi data, dan mengurus administrasi program dengan lancar. Dukungan dari pemerintah daerah atau lembaga terkait sangat diperlukan agar mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ini sejalan dengan pandangan Grindle yang menekankan perlunya dukungan yang memadai dari berbagai tingkatan pemerintahan untuk memastikan program berjalan efektif.



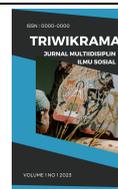
Meskipun demikian, tantangan administratif masih muncul, terutama dalam hal pengisian formulir dan pengumpulan dokumen. Beberapa penerima manfaat melaporkan mengalami kesulitan dalam proses ini, namun pendamping PKH dengan sigap memberikan arahan dan membantu mengatasi masalah tersebut. Pendamping memberikan panduan yang jelas dan prosedur yang harus diikuti agar proses administrasi berjalan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada sistem yang baik, pelaksanaan di lapangan masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan sosialisasi agar lebih banyak masyarakat yang mendapatkan manfaatnya. Di tingkat sekolah, kapasitas administratif dalam mengelola KIP juga menjadi sangat penting. Sekolah harus memiliki pengetahuan tentang proses pengelolaan KIP, penggunaan sistem yang tepat untuk pelaporan dan verifikasi data, serta kemampuan dalam mengatur informasi siswa penerima dengan baik. Staf sekolah perlu mendapatkan pelatihan terkait tata cara pengisian formulir, prosedur verifikasi, dan pemahaman terhadap kebijakan terbaru. Dengan dukungan pelatihan yang baik, sekolah dapat meningkatkan efisiensi dalam penyaluran bantuan KIP kepada siswa yang berhak, memberikan manfaat yang lebih baik bagi mereka.

Sistem informasi yang baik memungkinkan data peserta dan distribusi bantuan dapat dikelola dengan efisien. Kerjasama yang baik dengan Dinas Sosial dan pihak lain juga perlu diperhatikan agar integrasi program-program ini berjalan lancar di tingkat lokal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program adalah akurat dan up-to-date, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Grindle. Dalam keseluruhan analisis ini, terlihat bahwa keberhasilan implementasi PKH dan KIP sangat bergantung pada peningkatan kapasitas administratif di berbagai tingkatan. Pelatihan rutin, dukungan pemerintah, sistem informasi yang handal, serta kerjasama antar lembaga adalah kunci untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan efisien dan efektif, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan komprehensif dalam mengelola program-program sosial, yang melibatkan berbagai aspek administratif dan operasional untuk mencapai hasil yang optimal bagi masyarakat.

5. Partisipasi Publik

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) menunjukkan adanya keterlibatan aktif dari berbagai pihak, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, pendamping PKH, pihak sekolah, hingga masyarakat penerima manfaat. Menurut teori implementasi Marilee S. Grindle, efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama: isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Dalam konteks PKH dan KIP, isi kebijakan mencakup tujuan dan manfaat program yang jelas, seperti bantuan biaya pendidikan untuk meringankan beban keluarga miskin. Kedua dinas terkait secara aktif menerima dan merespon umpan balik dari masyarakat melalui berbagai forum dan survei, yang mencerminkan adanya perhatian terhadap konteks implementasi. Ini sejalan dengan pendapat Marilee S. Grindle bahwa keterlibatan masyarakat dan penerimaan umpan balik adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif. Pendamping PKH juga berperan penting dalam mendukung masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas dan mengajak mereka berpartisipasi aktif dalam program. Hal ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya disosialisasikan dengan baik, tetapi juga dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara langsung, sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan penerima manfaat.

Pentingnya sosialisasi yang lebih intensif dan penyediaan informasi yang lebih jelas mengenai syarat dan prosedur pengajuan bantuan. Ini menunjukkan bahwa meskipun program ini sudah berjalan dengan baik, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal transparansi dan penyebaran informasi. Dengan demikian, evaluasi berkala dan peningkatan sosialisasi dapat meningkatkan kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap program ini,



yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas implementasi sesuai dengan teori Grindle. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dan penerimaan umpan balik secara aktif dalam PKH dan KIP sejalan dengan prinsip-prinsip implementasi kebijakan yang efektif menurut Marilee S. Grindle, yang menekankan pentingnya memperhatikan baik isi kebijakan maupun konteks implementasinya.

6. Kultur dan Nilai Lokal

Dalam analisis implementasi program berdasarkan teori Marilee S. Grindle, faktor konteks lokal dan nilai-nilai budaya menjadi elemen penting yang menentukan keberhasilan suatu program. Dinas Sosial Surabaya berusaha keras untuk menyelaraskan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat setempat. Implementasi program ini dilakukan melalui pendekatan edukasi dan dialog aktif dengan komunitas, yang bertujuan untuk mengurangi resistensi budaya dan meningkatkan penerimaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori Grindle yang menekankan pentingnya adaptasi program terhadap konteks lokal agar program lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.

Pendamping PKH melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin adat dalam sosialisasi untuk memastikan bahwa program ini dihormati dan dipercaya. Selain itu, penghargaan terhadap nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan pentingnya pendidikan juga diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam keberhasilan program. Meskipun ada tantangan berupa perbedaan persepsi dan stigma sosial terhadap penerima bantuan, edukasi yang tepat dan komunikasi efektif menjadi strategi utama dalam mengatasi hambatan ini. Dukungan masyarakat terhadap program KIP menunjukkan bahwa program yang menghargai tradisi dan nilai-nilai setempat memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Penerapan program KIP yang menghormati nilai-nilai budaya seperti kebersamaan dan gotong royong menunjukkan bahwa penyesuaian program dengan konteks lokal dapat memperkuat dukungan masyarakat dan memastikan program tersebut berjalan sesuai harapan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Surabaya berhasil dalam upaya pemerataan pendidikan. Program ini efektif dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial keluarga penerima manfaat, serta akses mereka terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Kerja sama yang baik antara berbagai lembaga pemerintah memastikan bantuan disalurkan tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Dukungan politik yang kuat di tingkat daerah juga berperan penting dalam keberhasilan program ini. Selain itu, peningkatan kapasitas administratif melalui pelatihan dan sistem informasi yang handal membantu program berjalan lebih efisien. Partisipasi aktif masyarakat dan penyesuaian program dengan nilai-nilai lokal, seperti gotong royong, juga mendukung keberhasilan implementasi PKH dan KIP. Semua ini mencerminkan teori implementasi kebijakan Marilee S. Grindle yang menekankan pentingnya adaptasi program terhadap konteks lokal untuk mencapai hasil yang optimal.
2. Implementasi Program Keluarga Harapan melalui Kartu Indonesia Pintar di Surabaya dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yang signifikan. Faktor



pendukung mencakup koordinasi yang baik antar instansi terkait, validitas data yang diperbarui, infrastruktur teknologi yang memadai, sosialisasi efektif kepada penerima bantuan, dan dukungan dari komunitas serta pihak sekolah. Namun, ada juga faktor penghambat seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, masalah pendataan yang tidak akurat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang program, serta kendala administratif dan teknis dalam pencairan dana. Untuk memastikan keberhasilan program, diperlukan kerjasama yang lebih baik antar lembaga terkait dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan implementasi PKH melalui KIP di Surabaya dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat

Saran

Berdasarkan Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan dan Kartu Indonesia Pintar di Surabaya, diperlukan penguatan kerjasama antar-lembaga pemerintah, dukungan politik yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas administratif melalui pelatihan dan sistem informasi yang lebih baik, adaptasi program dengan nilai-nilai lokal, serta evaluasi rutin untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas implementasi.
2. Untuk memastikan keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan melalui Kartu Indonesia Pintar di Surabaya, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, validitas data yang terus diperbarui, infrastruktur teknologi yang memadai, sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, dukungan aktif dari komunitas dan pihak sekolah, serta penyelesaian kendala administratif dan teknis dalam pencairan dana.

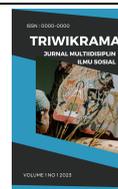
Daftar Pustaka

Fiqih, M., Dayat, U., Febriantini, K., & Singaperbangsa, U. (n.d.). Implementasi kebijakan program indonesia pintar (pip) pada jenjang sekolah dasar. 18(4), 2021–2539. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>

Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Number 1 Indonesian Journal of Education Management and Administration Review (Vol. 2).

Pendidikan, K., Kebudayaan, D., Penelitian, B., Pengembangan, D., Penelitian, P., & Pendidikan, K. (2018). KAJIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP): STRATEGI PENJANGKAUAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP).

Administrasi Negara, J., Mutiara Rakista Program Studi Magister Administrasi Publik Fisip Univerditas Jendral Soedirman, P., & Mutiara Rakista, P. (n.d.). Print) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas) POLICY IMPLEMENTATION OF THE INDONESIA PINTAR



PROGRAM (PIP) (Case Study at Elementary Schools in Banyumas Regency. SAWALA, 8, 224–232.

Sri Ismayani, M., Darusman, Y., Kurniawan, D., & Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan, J. (n.d.). IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP). In *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* (Vol. 4).

Muqti, N., & Haqiqi, Y. A. (n.d.). EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SMP NEGERI 1 DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO.

UPLOAD AGES PRADINA. (n.d.).

Suardi, W., Priyo Purnomo, E., & Salsabila, L. (n.d.). PENERAPAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN “PROGRAM INDONESIA PINTAR” DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA. *Jurnal MODERAT*, 7(3).

Suparman, E., Tinggi, S., Administrasi, I., & Priatim Tasikmalaya, Y. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SALOPA DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA.

Ngiode, S., & Erwinsyah, A. (2020). KEEFEKTIFAN PROGRAM INDONESIA PINTAR DI MADRASAH KABUPATEN GORONTALO. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 48–58. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i1.987>